

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

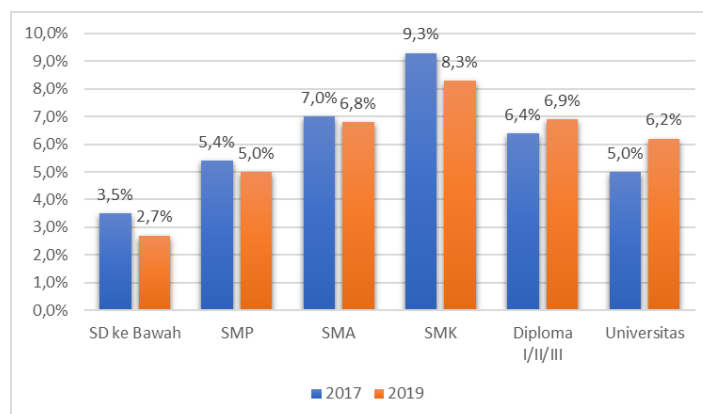
Setiap individu warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atas mutu pendidikan yang baik, dimana pendidikan dapat menjadi wadah yang subur dalam pengembangan minat dan bakat peserta didiknya dalam setiap individu tanpa harus membedakan atau meyamarkan status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun kecakapan hidup (*life skills*) manusia Indonesia sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya dan dalam mewujudkan masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi agenda wajib dalam pembangunan, dengan semakin pesatnya perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi yang telah membawa manusia ke era disrupsi teknologi dan persaingan global yang semakin ketat. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan peran pendidikan harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara komprehensif, sistematis, terencana, terarah, intensif, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensinya dalam proses pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Saat ini implementasi dari Renstra periode 2020/2024 memasuki tahun ke-2 dari program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud periode 2020/2024. Kemdikbud mulai memperhitungkan tren globalisasi terkait kemajuan pesat dan disrupsi dari teknologi, pergeseran dalam konteks sosio-kultural, perubahan sustainability lingkungan, dan perbedaan kebutuhan keterampilan IDUKA masa depan dalam bidang pendidikan tinggi khususnya. Dengan demikian saat ini Renstra Kemendikbud tersebut juga sedang berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman yang saat ini digunakan untuk pembangunan SDM dalam memanfaatkan serta mengoptimalkan bonus demografi sebagai kunci tercapainya bangsa yang maju serta berkeadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan.

Namun demikian yang menjadi tantangan adalah Perguruan Tinggi salah satu lembaga yang menghasilkan pembanguna SDM yang terampil dan berkualitas, di sisi lain masih ada tantangan yaitu terus meningkatnya angka pengangguran di tataran lulusan perguruan tinggi, sebagaimana dideskripsikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: katadata.id (2019)

Gambar 1. 1
Grafik Pengangguran Terdidik

Gambar grafik di atas mengutip publikasi katadata.id (2019), angka pengangguran intelektual/terdidik meningkat sekitar 25 persen pada program sarjana dan sekitar 8,5 persen pada program diploma, sejak Februari 2017 hingga Februari 2019. Penyebab meningkatnya angka pengangguran terpelajar tersebut adalah 1) ekspektasi penghasilan dan status lulusan lebih tinggi dari pada pekerjaan yang ada. 2) hasil identifikasi IDUKA memiliki spesifikasi kebutuhan

keterampilan yang berbeda dengan keterampilan lulusan. 3) terbatasnya kesempatan pekerjaan/IDUKA bagi lulusan.

Permasalahan berikutnya adalah tantangan disrupsi teknologi yang mempengaruhi perkembangan industri dan dunia kerja, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi vokasi yang seharusnya menjadi penghasil angkatan kerja terampil di dunia industri dan dunia kerja tersebut. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu ke belakang, civitas pendidikan tinggi digegerkan oleh informasi dari *Google dan Ernst & Young* yang akan mepekerjakan siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, (termasuk ijazah dari PT).

Dengan adanya fenomena tersebut mendorong seorang Guru Besar bernama Sudaryono untuk menulis tanggapan terhadap permasalahan tersebut, dengan artikel yang berjudul "Bunuh Diri Masal PT Menuju Pendidikan *Asembling*", dimana beliau membahas model dua arus utama yaitu; (1) penyelenggaraan PT dengan visi kategori *discovery/Academic* dan (2) penyelenggaraan PT dengan visi kategori melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit/vokasi (*assembling*) yang sangat dibutuhkan oleh IDUKA. Dimana penyelenggara PT yang pertama, karena membutuhkan kemampuan yang tinggi, namun jumlah kebutuhannya sedikit, maka penyelenggara PT yang termasuk pada kategori *Discovery/Academic* dengan program studi yang ada di universitas tersebut, dibatasi baik jumlahnya maupun mahasiswanya. Sedangkan PT yang termasuk pada kategori *Assembling/Vokasi* atau perguruan tinggi vokasi, karena tidak membutuhkan kemampuan setinggi PT kategori *Discovery/Academic*, namun kebutuhannya banyak, dibuka kesempatannya seluas-luasnya, (dimuat di Kompas 29 Agustus 2017).

Penomena tersebut terjadi, salah satu penyebabnya adalah untuk menjawab tantangan tersebut dimana saat ini ada kesenjangan antara kebutuhan IDUKA dengan sumber daya manusia terampil yang tersedia, Negara Indonesia masih kekurangan 57 juta tenaga kerja terampil hingga tahun 2030, (katadata.co.id, 2017), namun demikian justru perkembangan keterampilan individu sangat sedikit sekali, hal tersebut sebagaimana dideskripsikan pada gambar bagan di bawah ini.

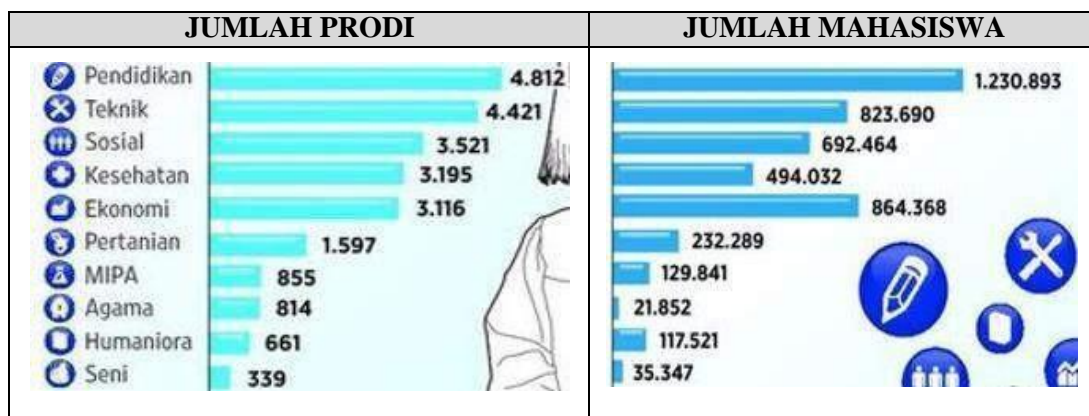


Sumber: katadata.id (2019)

Gambar 1. 2
Grafik Individu yang Memiliki Keterampilan

Gambar grafik di atas menunjukkan secara kontraproduktif dengan perkembangan individu dengan keterampilan dengan kategori sangat tinggi pada tahun 2019 dari per 100 individu di usia 15 tahun di Indonesia adalah sekitar 0,5 di bawah India yaitu sekitar 0,8, sedangkan Amerika Serikat sekitar 6,5, Thailand 9,4 dan Korea Selatan sekitar 18,2, (kadata.co.id, 2019).

Namun demikian kesenjangan tersebut masih belum ada optimisme terhadap adanya jawaban dari lulusan lembaga pendidikan tinggi khususnya vokasi, mengingat masih tingginya kesenjangan *Link and Match* antara Jenis Prodi yang ada dengan kebutuhan keterampilan pada Dunia Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA). Hal ini sebagaimana terlihat pada data sebaran jenis Prodi yang ada saat ini, dimana secara Nasional didominasi oleh jenis Prodi Pendidikan sementara sektor yang dibutuhkan IDUKA adalah untuk sektor Industri, Pertanian dan bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).



Sumber: Litbang "Kompas"/INO/DEW, diolah dari forlap.dikti.go.id dan berbagai sumber

Gambar 1. 3
Sebaran Jumlah Program Studi dan Jumlah Mahasiswa

Gambar grafik di atas menunjukkan adanya permasalahan *link and match* antara PT dan IDUKA ini, menjadi fokus Kemendikbud Riset Dikti untuk melakukan revitalisasi politeknik atau pendidikan vokasi, mulai dari kurikulum, penguatan kapabilitas dan kapabilitas serta profesionalitas dosen hingga capaian kompetensi mahasiswa sebagai bentuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi vokasi kedepannya. Sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah, syarat kelulusan bagi mahasiswa Akademi atau pendidikan tinggi vokasi adalah memiliki sertifikat kompetensi. Lulusan dari PT vokasi adalah tenaga terampil siap pakai untuk IDUKA. Kurikulum pendidikan vokasi disusun bersama dengan kebutuhan IDUKA sehingga program studi di pendidikan tinggi vokasi harus fleksibel.

Pada data sebaran sebagaimana diperlihatkan di atas, menunjukkan adanya peluang yang sangat luas untuk Perguruan Tinggi dalam membuka Program Studi baru yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil tersebut, namun demikian semua Perguruan Tinggi hendaknya tetap melakukan hal tersebut dengan sangat hati-hati dan dengan perencanaan strategis yang sangat matang. Pihak penyelenggara pendidikan tinggi tetap harus mengarusutamakan dan mengedepankan kualitas dalam mengelola setiap program studi, tidak hanya mengedepankan kuantitas program studi. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kebutuhan IDUKA di tengah masyarakat, dalam membuka program studi. Rasio jumlah dosen yang memiliki relevansi dengan jumlah mahasiswa juga perlu dipertimbangkan. Pembukaan jenis Prodi baru tanpa kesiapan pemetaan Prodi baru dengan perencanaan strategis penguatan manajemen pendidikan tinggi yang matang dengan hanya melihat trend semata, malah akan merugikan penyelenggara pendidikan tinggi itu sendiri.

Selain pertimbangan kualitas dan kebutuhan pasar IDUKA, pembukaan Program Studi baru juga akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, yang tentunya bisa berdampak positif ataupun negatif. Dalam banyak aspek karakteristik sistem pendidikan secara umum dan khususnya pada sistem pendidikan tinggi/PT di beberapa negara maju berbeda dengan karakteristik sistem pendidikan di negara berkembang. Dimana di negara maju, pendidikan memang mampu mendorong perkembangan IDUKA dengan dicetaknya tenaga- tenaga ahli baru yang terampil. Misalnya belajar dari di Jepang, untuk

membangun industri mobil, maka disiapkan terlebih insinyur di bidang otomatis dari pendidikan tinggi. Tidak seperti halnya yang berlaku pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, pendidikan untuk mengisi perkembangan pasar IDUKA. Jadi pasarnya ada dulu, baru diisi tenaga yang dicetak lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Karena itu, jika cetakan perguruan tinggi tidak memenuhi kebutuhan pasar maka relevansinya dengan sektor riil dipertanyakan.

Oleh karena itu sudah semestinya pembukaan prodi baru dipertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan perguruan tinggi sendiri, permintaan pasar atau serapan mahasiswa, juga keterkaitan dengan pasar atau memperhatikan *links and match*. Jika beberapa aspek pada masalah-masalah tersebut telah diperhatikan, maka pembukaan jenis Prodi baru di PT tidak akan menimbulkan masalah. Pembukaan jenis Prodi baru baik prodi akademik maupun vokasi seharusnya dapat mendorong tercapainya penyediaan tenaga ahli yang terampil yang dibutuhkan IDUKA.

Adapun peluang banyak PT dalam menjawab tantangan di atas dengan berlomba-lomba membuka prodi baru, karena hal tersebut dianggap mampu menghadapi dan menjawab tantangan jaman, dalam satu sisi hal ini merupakan respon yang sangat baik namun, pembukaan jenis prodi baru harus tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Tidak jarang prosesnya perlu waktu dan dilakukan riset tertentu untuk melahirkan inovasi, dimana hasil-hasil riset tersebut menjadi harapan agar bisa menjadi solusi di era disrupsi teknologi dan menjadi aset perkembangan ilmu pengetahuan (*Knowledge Management*) dengan pembukaan jenis Prodi baru yang mampu menjawab tantangan zaman tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena disrupsi teknologi telah menghilangkan beberapa profesi. Beberapa hasil riset menunjukkan, bahwa di beberapa negara besar atau maju seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan orang yang telah kehilangan profesi dengan rentang 15-30 persen.

Selain perencanaan strategik yang matang dan faktor kehati-hatian dari PT pemerintahpun melalui lembaga terkait perlu melakukan kontrol ketat terhadap peluang pembukaan Prodi baru ini, karena selain tuntutan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan perguruan tinggi juga harus dijamin mutunya

dengan mengikuti berbagai aturan diantaranya mengenai Sistem Tata kelola Pendidikan Tinggi diatur melalui UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Statuta kampus dan aturan lainnya.

Faktor selanjutnya yang harus menjadi pertimbangan adalah Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 terutama ayat 1 dan lebih lanjut pada ayat 2, 3 dan 4, menegaskan Prodi terakreditasi yang berhak meluluskan: (1) ijazah diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atas penyelesaian suatu Prodi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Isu utama yang merupakan tantangan Akreditasi PT adalah: (1) Sistem Penjaminan Mutu, meski telah memiliki SPMI tetapi cukup sulit untuk memenuhi oleh keseluruhan Prodi yang memiliki keberagaman potensi atau kemampuan (terutama prodi baru); (2) daya saing lulusan di pasar IDUKA (sebagian besar karena memang “intake SDM” yang harus memperhatikan perbedaan potensi dan kemampuan dari Perguruan Tinggi menengah ke bawah, proses tidak dapat optimal dengan kondisi butir (1), daya saing juga tidak optimal); (3) Kemampuan Finance PT. yang terbatas dan atau belum memiliki sumber lain selain dari mengandalkan dari Uang Kuliah.

Kemampuan adaptif Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang baik serta terencana, seharusnya dapat menjawab segala permasalahan tersebut di atas. Kemampuan adaptif Perguruan Tinggi ini khususnya dalam membuka program studi baru, harus disesuaikan dengan hasil kajian analisis situasi strategis perkembangan ilmu pengetahuan (*Knowledge Management*) beserta dampak disrupsi teknologi yang terjadi dan kebutuhan lapangan IDUKA. Adapun Pemerintah dalam mendorong upaya tersebut, yaitu dengan menerbitkan regulasi yang tertera dalam Permendikbud Nomor 7 Th. 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Pembukaan Prodi baru pada regulasi tersebut di atas mengatur hal-hal berikut; (1) Pembukaan Prodi akademik bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi; (2) Pembukaan Prodi akademik untuk penambahan

jumlah Prodi pada PT yang telah berdiri; (3) Pembukaan Prodi akademik sebagai penambahan Prodi akademik bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) Prodi akademik; (4) Pembukaan Prodi akademik bersamaan dengan proses perubahan PTS yang berupa penggabungan, penyatuan, dan perubahan bentuk; (5) Pembukaan Prodi akademik (selain program studi bidang kesehatan dan kependidikan) oleh PT dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, akreditasi Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerjasama.

Merujuk pada Permendikbud nomor 7 tahun 2020, pembukaan prodi baru yang telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, akan mendapatkan akreditasi dengan peringkat `Baik` pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri. Mengacu pada aturan regulasi tersebut, upaya untuk pembukaan prodi baru tahapannya termasuk tidak mudah. Termasuk konsekuensi dan kompensasi dari pembukaan prodi baru. Sebab mahasiswa tentu tidak mau lulus dengan akreditasi C, karena akan mempersulit ketika melamar pekerjaan di instansi pemerintahan maupun instansi swasta, meskipun secara perizinan akan dimudahkan.

Kemudian nantinya mahasiswa yang telah lulus akan dihadapkan dengan realita yang akan dialami oleh para fresh graduate dengan perusahaan penyerap tenaga kerja, jika hal tersebut tetap dilakukan tentunya hal ini akan menyulitkan mahasiswa. Hal lain selanjutnya adalah prodi tidak bisa meluluskan sarjana jika belum terakreditasi. Dalam hal ini banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk bisa memperoleh nilai B, minimal penilaian borang harus mencapai angka 300- 359 poin. Berikut adalah data yang diperoleh dari LLDIKTI IV Wilayah Jabar dan Banten terkait dengan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Tabel 1. 1
Akreditasi Perguruan Tinggi

Bentuk	TT	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik
Universitas	14	5	37	24		1	6
Institut	2		7	1		1	1
Perguruan Tinggi Tinggi	72		44	77		6	23
Akademi	42		3	35			11
Politeknik	17		8	12			3
Akademi Komunitas	5						
Sub Total	152	5	99	149	0	8	44
Total	457						

Sumber: LLDIKTI IV Jabar dan Banten

Tabel di atas mendeskripsikan bahwa permasalahan berikutnya dengan adanya regulasi yang dibahas di atas, tidak sepenuhnya memberi kemudahan untuk beberapa PT yang belum dapat memenuhi kriteria-kriteria tata kelola pada aturan tersebut walaupun sudah diperlonggar. Kemudian jumlah PT yang memiliki akreditasi sesuai kriteria belum tersebar pada seluruh daerah dan termasuk pada PT Vokasi masih didominasi oleh yang belum memenuhi kriteria tersebut, yang memiliki akreditasi B hanya ada 8 PT sedangkan yang belum terakreditasi 17 PT dan yang terakreditasi C terdapat 12 PT, terlebih pada sebaran wilayah masih didominasi wilayah tertentu. Selanjutnya di bawah ini peneliti deskripsikan juga tentang akreditasi Program Studi sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Akreditasi Program Studi

Bentuk	TT	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik
Universitas	120	138	657	197	5	9	112
Institut	10	9	41	15		2	18
Perguruan Tinggi Tinggi	41	6	281	153		9	62
Akademi	2		37	24		5	9
Politeknik	38	4	55	37			11
Akademi Komunitas	3		1				
Sub Total	214	157	1072	426	5	25	212
Total	2111						

Sumber: LLDIKTI IV Jabar dan Banten

Tabel di atas menunjukkan bahwa Prodi yang terakreditasi C masih terdapat sekitar 426 Prodi dan terdapat 214 Prodi yang belum terakreditasi, itu artinya terdapat sekitar 30,32 % dari Prodi yang ada di Jabar dan Banten masih menjadi kendala untuk dapat melakukan pengembangan Prodi.

Dengan demikian pembukaan prodi ini harus melalui perencanaan strategis yang matang yaitu dengan melakukan pemetaan dan sinkronisasi kebutuhan masyarakat dengan kapasitas tenaga pengajar serta melakukan inovasi dengan penguatan tata kelola manajemen PT. Diantaranya harus melakukan analisis dalam perencanaan strategis PT adalah mengenai (1). Kajian pasar input (bakal calon mahasiswa) dan pasar output (serapan lapangan kerja untuk lulusannya), (2).

Kecukupan SDM Dosen yang mengampu mata kuliah utama prodi, (3). Dukungan sarana dan pra-sarana seperti ruang kuliah dan laboratorium, (4). Menjajaki kemungkinan dunia industri yang bersedia bekerja sama, dengan kata lain mengharuskan adanya program penguatan pada bidang tata kelola PT.

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perencanaan strategik dalam pemetaan prodi baru yang berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, antara lain visi dan misi, tata kelola, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, pembelajaran dan suasana akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prasarana dan sarana, serta keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Model Implementasi Perencanaan Strategik Pemetaan Prodi Baru Berbasis Penguatan Manajemen Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Jawa Barat dan Banten.

B. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti mencoba mengidentifikasi beberapa unsur terpenting yang diteliti terkait dengan tema sentralnya dalam penelitian ini adalah Model perencanaan strategik pemetaan Prodi baru yang berbasis penguatan Manajemen Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Jawa Barat dan Banten.

Selain yang sudah diuraikan di atas, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perencanaan strategik pemetaan prodi baru. Masalah yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten khususnya di PTS ini mereka mengalami kendala, yaitu kendalanya ketika mau membuka program studi baru ini mereka tidak melakukan perencanaan strategis yang relatif matang, artinya mereka lebih mengutamakan pada trendi atau trend nya Prodi ini akan maju maka mereka bukalah prodi tersebut sehingga ini akan kesulitan bagi pengembangan program studi tersebut ke depan, sehingga dalam perjalanannya banyak program studi yang tutup.

Oleh sebab itu perlu pendidikan tinggi itu untuk melakukan sebuah perencanaan strategi yang matang, terutama dalam pembukaan program studi yang baru. Riset ini dilakukan di wilayah Kopertis Jawa Barat dan Banten

khususnya pada PTS. Nanti mengambil PTS mana yang unggul, PTS mana yang sedang, dan PTS mana yang kurang baik. Jadi respondennya itu adalah pembuat kebijakan, dosen dan mahasiswa serta sumber data- sumber data lain yang sekiranya dibutuhkan. Ini penelitian yang bagus sehingga jika peneliti setingkat Desertasi ini, maka di wilayah Jawa Barat dan Banten itu akan memberikan warna terhadap PTS PTS disekitar tersebut atau PTS yang lain pada umumnya.

Dengan demikian untuk di Bab 1 ini menjelaskan bagaimana kondisi PTS di wilayah Jawa Barat dan Banten, itu digambarkan. Berikutnya apa yang terjadi dengan program pembukaan studi baru di PTS wilayah Jawa Barat dan Banten, apa saja yang mereka lakukan. Berikutnya adalah bagaimana buktinya apakah mereka itu melakukan perencanaan perencanaan yang matang ketika membuka program studi baru tersebut. Berikutnya menjelaskan juga jika pembukaan program studi baru mengabaikan perencanaan strategik yang matang, maka akan berdampak terhadap apa? Sehingga sebagai penutup yaitu penjelasan bahwa jika ini dilakukan yaitu perencanaan strategik dilakukan, maka akan berdampak pada penguatan manajemen perguruan tinggi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang dan identifikasi masalah di atas, ditemukan bahwa. Dari berbagai permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Banyak permasalahan yang dapat diteliti terkait dengan variabel yang berhubungan perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi. Namun karena berbagai keterbatasan peneliti, maka penelitian ini akan dibatasi pada menganalisa Model perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi swasta (PTS) di Wilayah Jawa Barat dan Banten.

1. Bagaimana perencanaan strategik pada PTS di Wilayah LL Dikti IV Jabar dan Banten?
2. Bagaimana program penguatan manajemen pendidikan tinggi pada PTS Wilayah LLDikti IV Jabar dan Banten?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembukaan prodi baru di wilayah LLDikti IV Jabar dan Banten?

4. Bagaimana formulasi model pembukaan prodi baru berbasis perencanaan strategis penguatan manajemen pendidikan Tinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini berupaya untuk menjawab atas rincian pertanyaan penelitian sebagaimana yang tercantum pada rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Tergambarnya perencanaan strategik pemetaan Program Studi baru pada PTS di Wilayah LL Dikti Jabar dan Banten.
- b. Tergambarnya bagaimana penguatan penguatan dalam pembukaan program studi baru pada PTS Wilayah LLDikti Jabar dan Banten.
- c. Terdeskripsikan bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembukaan prodi baru di wilayah LLDikti Jabar dan Banten.
- d. Tersusunnya implementasi formulasi model pembukaan prodi baru berdasarkan penguatan manajemen pendidikan Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dalam aspek pengembangan teoritis maupun praktis pelaksanaan perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam khasanah ilmu pendidikan khususnya konsentrasi administrasi pendidikan dalam menganalisis perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi dengan penemuan model yang lebih efektif, efisien dan praktis, sedangkan bagi peneliti dapat meningkatkan kemampuan penelitian dengan mengkhususkan keahlian pada bidang ilmu administrasi pendidikan kajian perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan dan tentang program perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, secara berkelanjutan baik bagi peneliti, pemerintah maupun para penerima manfaat lainnya. Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang konsep dan implementasi perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, secara teoritik dan praktis.
- b. Bagi pengambil kebijakan perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai formula baru dalam mengimplementasikan perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, di masing-masing daerah dan tempat kerja dengan memperhatikan kekhasannya.
- c. Bagi Dosen di Pendidikan Tinggi, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi model dalam mengimplementasikan perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi.
- d. Bagi Mahasiswa Penelitian ini sangat berguna agar pemilihan program studi disesuaikan dengan trend dan tuntutan pasar kerja yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan dunia industri.
- e. Karena masih banyak hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, menjadi salah satu kelemahan penelitian, atas dasar itu sangat diperlukan penelitian lanjutan oleh para peneliti berikutnya.

3. Struktur Organisasi Disertasi

Sistematika berpikir peneliti dalam penelitian disertasi ini bermula dari latar belakang yang menjadi alasan yang mendasar kenapa harus meneliti tentang implementasi perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi, selanjutnya melakukan identifikasi dan perumusan masalah, kebaharuan dalam penelitian, definisi konsep-konsep esensial dalam topik disertasi, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi disertasi.

Adapun yang menjadi struktur organisasi dalam disertasi ini, dapat dijabarkan dalam empat bab sebagai berikut:

BAB 1. Menggambarkan keseluruhan dari isi disertasi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

BAB 2. Menggambarkan grand teori, teori pendukung dan konsep-konsep yang mendukung penelitian, antarlain; teori Renstra Kemendikbud yang diturunkan menjadi Renstra Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kajian teoritis tentang perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi. Aspek perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi di implementasikan dalam tinjauan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan moniorng serta evaluasi dan refleksi sebagai tindak lanjut dari program yang telah dilakukan agar disempurnakan pada program berikutnya.

BAB 3. Menggambarkan tentang apa, mengapa dan bagaimana peneliti menentukan metode yang digunakan, mencari dan mendapatkan data dari sumber data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menetapkan pihak-pihak yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, menampilkan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, sampai pada alat yang digunakan peneliti dalam menganalisis data.

BAB 4. Menggambarkan temuan penelitian yang diperoleh pada saat pengumpulan yang kemudian telah melalui proses analisis data penelitian yang berisi tentang pembahasan atau komentar peneliti terhadap temuan dengan dukungan dari teori, konsep dan hasil penelitian yang mendukung atau tidak mendukung terhadap hasil penelitian yang dikemukakan.

BAB 5. Menggambarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap temuan dan pembahasan hasil penelitian, kemudian Implikasi serta rekomendasi yang dirumuskan untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut dari analisis Implementasi perencanaan strategik pemetaan prodi baru berbasis penguatan manajemen pendidikan tinggi dan menemukan jawabannya.